



Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu (SIMPADU) Dalam Pelayanan Kapal di Pelabuhan Makassar

Enjelika Marbaroka^{*1}, Satria^{*2}, Sarifuddin³

¹⁻³Prodi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Dan Kepelabuhan, Universitas Sanz Magnatya Palembang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: enjellika30@icloud.com

Abstract. *The Port of Makassar demands ship service mechanisms that are rapid, effective, and transparent in order to support smooth port operations. This study focuses on analyzing the implementation of the Integrated Licensing Management Information System (SIMPADU) as an effort to improve the performance of vessel licensing services at the port. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, direct field observations, and analysis of relevant documents. The results indicate that the use of SIMPADU has significantly streamlined the vessel licensing process by shortening processing time, lowering administrative costs, increasing service transparency, and improving access to licensing information for stakeholders. These improvements contribute to reduced vessel waiting times and better coordination among related agencies operating within the port environment. However, several obstacles remain, including inadequate supporting infrastructure, unstable network connectivity, and limited human resource capabilities in operating the system optimally. Despite these challenges, SIMPADU plays an important role in supporting the modernization of port services and the digital transformation of licensing procedures. To maximize its benefits, continuous capacity building through training programs and stronger integration of cross-agency services are required to ensure sustainable and efficient port service delivery.*

Keywords: Digital Licensing; Efficiency; Port Of Makassar; Ship Services; SIMPADU.

Abstrak. Pelabuhan Makassar membutuhkan mekanisme layanan kapal yang cepat, efektif, dan transparan untuk mendukung kelancaran operasional pelabuhan. Studi ini berfokus pada analisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu (SIMPADU) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja layanan perizinan kapal di pelabuhan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan langsung, dan analisis dokumen terkait. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan SIMPADU telah secara signifikan menyederhanakan proses perizinan kapal dengan mempersingkat waktu pemrosesan, menurunkan biaya administrasi, meningkatkan transparansi layanan, dan meningkatkan akses informasi perizinan bagi para pemangku kepentingan. Perbaikan ini berkontribusi pada pengurangan waktu tunggu kapal dan koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait yang beroperasi di lingkungan pelabuhan. Namun, beberapa kendala masih ada, termasuk infrastruktur pendukung yang tidak memadai, konektivitas jaringan yang tidak stabil, dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem secara optimal. Terlepas dari tantangan ini, SIMPADU memainkan peran penting dalam mendukung modernisasi layanan pelabuhan dan transformasi digital prosedur perizinan. Untuk memaksimalkan manfaatnya, peningkatan kapasitas berkelanjutan melalui program pelatihan dan integrasi layanan lintas instansi yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan penyampaian layanan pelabuhan yang berkelanjutan dan efisien.

Kata kunci: Digitalisasi Perizinan; Efisiensi; Pelabuhan Makassar; Pelayanan Kapal; SIMPADU.

1. LATAR BELAKANG

Pelabuhan Makassar, sebagai gerbang utama Indonesia Timur, memiliki peran sentral dalam mendukung konektivitas logistik nasional dan regional. Lokasinya yang strategis menjadikannya pusat distribusi barang antarpulau serta jalur perdagangan internasional, terutama ke kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan (Kementerian Perhubungan, 2021). Namun, peningkatan signifikan volume arus kapal dan kargo dalam beberapa tahun terakhir menuntut peningkatan kapasitas layanan pelabuhan—tidak hanya dari sisi infrastruktur fisik, tetapi juga sistem manajemen dan tata kelola pelayanan. Tanpa transformasi layanan yang

memadai, potensi pelabuhan sebagai growth engine ekonomi regional dapat terhambat oleh inefisiensi operasional dan biaya logistik yang tinggi (Nurhayati & Rachim, 2022).

Sebelum adopsi sistem digital, proses perizinan kapal di Pelabuhan Makassar masih mengandalkan mekanisme manual berbasis kertas, yang rentan terhadap duplikasi dokumen, ketidakjelasan alur kerja, serta potensi penundaan akibat koordinasi antarinstansi yang tidak terintegrasi (Tandung et al., 2022). Proses birokratis seperti ini tidak hanya memperlambat waktu tunggu kapal (idle time), tetapi juga berdampak pada peningkatan biaya operasional bagi pengguna jasa, seperti demurrage dan detention charges. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip port community system yang menekankan pada interoperabilitas, kecepatan, dan transparansi layanan—sebagaimana dianjurkan oleh International Maritime Organization (IMO, 2019) dalam kerangka Facilitation of Maritime Traffic (FAL).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Kementerian Perhubungan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu (SIMPADU) yang terintegrasi dengan Inaportnet, sebuah platform single submission untuk layanan pelabuhan secara nasional. SIMPADU dirancang untuk menyatukan alur perizinan—mulai dari permohonan, verifikasi, hingga penerbitan dokumen—melalui satu pintu digital, sehingga meminimalkan intervensi manual dan mempercepat proses clearance kapal (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2023). Integrasi ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap e-government dan reformasi birokrasi sektor maritim, sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIMPADU di Pelabuhan Makassar dari perspektif tata kelola layanan publik digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif—melalui wawancara mendalam dengan petugas pelabuhan, agen kapal, dan operator logistik; observasi alur kerja sistem; serta analisis dokumen kebijakan—penelitian ini berupaya mengungkap realitas di lapangan: sejauh mana integrasi sistem telah mengubah praktik administratif, meningkatkan kepuasan pengguna, dan mendorong akuntabilitas institusional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika implementasi kebijakan teknologi yang sering kali tidak linear dan dipengaruhi oleh konteks lokal (Creswell & Poth, 2018).

Relevansi penelitian ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga strategis dalam mendukung maritime digital transformation nasional. Hasil kajian dapat menjadi bahan evaluasi bagi otoritas pelabuhan dalam memperbaiki antarmuka sistem, meningkatkan literasi digital pengguna, dan memperkuat kolaborasi antar-instansi vertikal-horisontal. Lebih jauh, temuan ini berkontribusi pada khasanah literatur tentang digital public service di sektor

transportasi laut—khususnya di negara berkembang dengan kompleksitas birokrasi tinggi—sebagaimana diingatkan Felicia (2022) bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, regulasi pendukung, dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan.

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi Penerapan

“Penerapan” adalah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti proses atau tindakan menerapkan sesuatu, seperti teori, ilmu, kebijakan, atau rencana, ke dalam praktik atau situasi nyata. Secara umum, penerapan berarti proses mengaplikasikan atau mengimplementasikan sesuatu ke dalam praktik nyata (Puspa, 2019). Sementara itu Agustin & Purwanto (2023) mengartikan penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Faridatul Faridatul & M Bambang Purwanto, 2025; Nasar et al., 2024). Penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Definisi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIMPADU)

(SIMPADU) adalah platform digital yang dikembangkan untuk memfasilitasi pengajuan, verifikasi, penerbitan, hingga pelaporan izin usaha dan nonusaha secara terpadu. Sistem ini biasanya diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) daerah dan memanfaatkan teknologi seperti tanda tangan elektronik, modul tracking, dan integrasi data antar instansi. SIMPADU merupakan sistem informasi berbasis elektronik.

Definisi Pelayanan Kapal

Pelayanan kapal merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan kepada kapal sejak masuk pelabuhan hingga kapal meninggalkan pelabuhan. Layanan ini meliputi pengurusan dokumen, izin tambat, penyediaan pemanduan, bongkar muat, hingga penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Menurut UU No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, pelabuhan wajib memberikan pelayanan yang aman, cepat, dan efisien kepada setiap kapal yang bersandar. Dalam praktiknya, pelayanan yang lambat atau tidak terkoordinasi dengan baik dapat menyebabkan biaya tambahan (extra cost) dan menurunkan tingkat kepuasan pengguna jasa pelabuhan (Habeahan & Lilis, 2024; Yuliana & Prakoso, 2022). Oleh karena itu, sistem

pelayanan yang modern dan terintegrasi seperti SIMPADU sangat penting untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kapal (Gultom & Ginting, 2024).

Definisi Pelabuhan

Pelabuhan Menurut Keputusan menteri Nomor 50 tahun 2021 adalah berbagai hal dengan operasional dan pengelolaan pelabuhan laut indonesia, Merupakan Suatu Wilayah Yang terdiri Atas Daratan , perairan, dengan batas tertentu sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat untuk bersandar kapal, Pelabuhan Kapal, Naik atau Turunnya Penumpang dan Bongkar Muat Barang yang dilakukan dengan Fasilitas-fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis penerapan *Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu* (SIMPADU) di Pelabuhan Makassar. Objek penelitian adalah pelayanan perizinan kapal yang dikelola Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar, dipilih karena pelabuhan ini memiliki arus kapal tinggi dan telah menerapkan SIMPADU secara terintegrasi. Subjek penelitian meliputi petugas pelabuhan, operator sistem, agen pelayaran, dan pengguna jasa lain yang terlibat langsung dalam proses perizinan.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan informan kunci, observasi non-partisipatif di area pelayanan kapal, serta dokumentasi berupa formulir perizinan, laporan kegiatan, dan foto aktivitas lapangan. Data sekunder diperoleh dari laporan resmi pelabuhan, regulasi pemerintah, dan publikasi terkait digitalisasi layanan pelabuhan. Pemilihan informan dan dokumen dilakukan secara purposif, berdasarkan keterlibatan dan relevansi terhadap topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pengelompokan, interpretasi, dan triangulasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini bertujuan memastikan validitas temuan dan menghasilkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas, manfaat, serta tantangan penerapan SIMPADU, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian secara tepat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu (SIMPADU) dalam pelayanan kapal di Pelabuhan Makassar?

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu (SIMPADU) di Pelabuhan Makassar merepresentasikan langkah strategis dalam transformasi digital sektor maritim. Sistem ini mendigitalisasi seluruh proses perizinan kapal, mulai dari pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), hingga *cargo manifest*. Sebelum penerapan SIMPADU, proses tersebut dilakukan secara manual dengan ketergantungan tinggi pada dokumen fisik, yang rentan menyebabkan keterlambatan dan inefisiensi. Digitalisasi ini mempersingkat waktu pemrosesan, mengurangi beban administrasi, dan meminimalisasi potensi kesalahan input data.

SIMPADU juga berfungsi sebagai platform integratif yang menghubungkan berbagai instansi terkait, termasuk KSOP, Pelindo, Bea Cukai, dan Karantina. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data secara cepat dan sinkron, menghilangkan redundansi proses, serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan. Fitur *real-time tracking* memberikan visibilitas penuh terhadap status perizinan, sementara penerapan *service level agreement* (SLA) yang jelas memastikan adanya standar waktu layanan yang terukur. Kombinasi fitur ini menjadikan SIMPADU tidak hanya sebagai alat operasional, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian mutu layanan pelabuhan.

Dari perspektif reformasi birokrasi, penerapan SIMPADU menandai pergeseran paradigma dari administrasi manual menuju sistem layanan publik berbasis teknologi. Sistem ini mendukung transparansi dengan menyediakan akses informasi yang terbuka bagi pengguna jasa, sekaligus memperkuat akuntabilitas melalui rekam jejak digital setiap transaksi. Secara konseptual, hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dan teori manajemen pelayanan publik yang menempatkan digitalisasi sebagai katalis peningkatan kinerja organisasi (Bickerton, 2016; M & Ahmad, 2017). Dalam konteks pelabuhan, hal ini berarti peningkatan daya saing logistik nasional melalui layanan yang lebih responsif dan efisien.

Secara akademik, temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur mengenai implementasi sistem informasi terintegrasi di sektor maritim, khususnya di negara berkembang. Penerapan SIMPADU di Pelabuhan Makassar dapat diposisikan sebagai studi kasus yang menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat mengatasi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, keberhasilan sistem ini menunjukkan bahwa keberlanjutan transformasi digital memerlukan sinergi antara teknologi, sumber daya manusia, dan koordinasi kelembagaan. Dengan demikian, SIMPADU tidak hanya relevan secara praktis,

tetapi juga memiliki signifikansi teoretis dalam pengembangan model layanan publik berbasis teknologi.

Apa saja manfaat yang dirasakan oleh pengguna jasa pelabuhan setelah diterapkannya SIMPADU dalam proses perizinan kapal?

Penerapan *Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu* (SIMPADU) memberikan dampak nyata terhadap pengalaman dan kepuasan pengguna jasa pelabuhan di Makassar. Perubahan paling signifikan dirasakan dalam hal efisiensi waktu, di mana proses perizinan yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Efisiensi ini sangat krusial mengingat waktu tunggu kapal berpengaruh langsung pada biaya operasional dan produktivitas rantai pasok. Dalam konteks logistik maritim, percepatan layanan ini dapat menekan biaya *demurrage* dan meningkatkan perputaran arus barang secara keseluruhan.

Selain efisiensi waktu, SIMPADU juga berkontribusi pada pengurangan biaya administrasi. Digitalisasi dokumen menghilangkan kebutuhan penggandaan berkas fisik dan meminimalkan mobilitas fisik antar kantor instansi, sehingga menghemat biaya transportasi dan logistik dokumen. Hal ini memperlihatkan bahwa adopsi teknologi informasi dalam pelayanan publik bukan hanya memberikan manfaat prosedural, tetapi juga mengarah pada efisiensi ekonomi yang terukur. Dalam kerangka teori efisiensi organisasi, pengurangan biaya ini mencerminkan peningkatan *resource utilization* yang optimal.

Manfaat lain yang dirasakan adalah kemudahan akses informasi. Melalui *dashboard* SIMPADU, pengguna jasa dapat memantau status perizinan secara *real-time*, mengetahui dokumen yang memerlukan revisi, serta mendapatkan notifikasi pembaruan. Akses informasi yang cepat dan akurat memudahkan perencanaan operasional kapal dan mengurangi potensi kesalahan koordinasi. Secara akademik, temuan ini menguatkan pandangan bahwa aksesibilitas informasi adalah salah satu pilar utama dalam peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi.

Transparansi menjadi aspek kunci lainnya (Kuncoro et al., 2020). Sistem ini mencatat seluruh proses perizinan secara digital, termasuk identitas petugas yang memproses permohonan dan estimasi waktu penyelesaian. Dengan demikian, peluang terjadinya praktik pungutan liar dapat diminimalkan, sementara kepercayaan publik terhadap penyelenggara layanan meningkat. Dari perspektif *good governance*, transparansi ini menciptakan akuntabilitas yang lebih kuat serta menjadi mekanisme pengawasan internal yang efektif (Rosyidi et al., 2018).

Peningkatan kepuasan pengguna jasa merupakan konsekuensi logis dari kombinasi efisiensi, akses informasi, dan transparansi. Mayoritas responden penelitian menyatakan SIMPADU mempermudah proses administrasi, mengurangi beban kerja manual, dan memberikan kepastian waktu layanan. Dalam literatur manajemen pelayanan publik, kepuasan pengguna dipandang sebagai indikator keberhasilan inovasi layanan (Aqsa, 2015; Ditasman et al., 2024). Peningkatan kepuasan ini juga berpotensi memperkuat citra positif pelabuhan sebagai simpul logistik yang modern dan kompetitif (Hurriyati, 2022; Putranto et al., 2018).

Secara akademik dan praktis, manfaat-manfaat ini menunjukkan bahwa SIMPADU bukan sekadar perangkat administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam reformasi pelayanan pelabuhan. Implementasinya memberikan kontribusi pada literatur terkait adopsi teknologi di sektor publik, terutama pada konteks pelabuhan di negara berkembang. Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi pelabuhan lain di Indonesia, dengan catatan bahwa keberlanjutan manfaat memerlukan dukungan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan fitur sistem dengan kebutuhan pengguna.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu* (SIMPADU) di Pelabuhan Makassar telah mempercepat dan mempermudah proses perizinan kapal, termasuk pengajuan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), PKK, *cargo manifest*, dan dokumen pendukung lainnya. Digitalisasi dan integrasi sistem memungkinkan proses dilakukan secara daring dengan pelacakan *real-time*, sehingga meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi biaya operasional, serta memperkuat transparansi dan koordinasi antar instansi. Dengan demikian, kedua rumusan masalah—mengenai penerapan SIMPADU dan manfaat yang dirasakan pengguna jasa—telah terjawab secara jelas.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat literatur tentang efektivitas digitalisasi layanan publik di sektor maritim, khususnya dalam konteks negara berkembang. Secara praktis, penerapan SIMPADU menjadi model reformasi birokrasi yang dapat direplikasi di pelabuhan lain dengan adaptasi terhadap kapasitas infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara teknologi, manajemen, dan sumber daya manusia untuk memastikan keberhasilan inovasi layanan publik.

Arah penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor keberlanjutan implementasi SIMPADU, termasuk evaluasi jangka panjang terhadap kepuasan pengguna dan dampaknya terhadap kinerja logistik nasional. Pendekatan ini akan memperluas

pemahaman tentang peran sistem informasi terintegrasi dalam mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan daya saing sektor transportasi laut.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, A., & Purwanto, B. M. (2023). Cooperative learning training through English exploratory vacation media for Palembang Darussalam tourism-aware students. *Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Negeri*, 2(4). <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v2i4.1478>
- Aqsa, M. (2015). Pengaruh kredibilitas perusahaan dan public figure dalam periklanan online terhadap sikap konsumen. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 14(1), 57–71. <http://103.114.35.30/index.php/balance/article/view/1301>
- Bickerton, D. (2016). *Roots of language*. Language Science Press. <https://doi.org/10.17169/langsci.b91.109>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2023). *Pedoman operasional SIMPADU dan integrasi Inaportnet*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Ditasman, D., Hartono, R., & Sari, F. R. (2024). Kualitas pelayanan keluarga berencana (KB) di Puskesmas Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(1), 270–284. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i1.1848>
- Faridatul, F., & Purwanto, M. B. (2025). Pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam pemasaran digital: Tantangan dan peluang. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 5(3), 607–622. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i3.7502>
- Felicia, A. (2022). Digital transformation in the Indonesian public sector: Challenges in maritime bureaucracy reform. *Jurnal Kebijakan Transportasi*, 7(2), 45–60.
- Gultom, R., & Ginting, M. (2024). Peran agen kapal dalam sistem digitalisasi pelabuhan Inaportnet di Indonesia. *Journal of Maritime Logistics*, 12(3), 45–58.
- Habeahan, P., & Lilis, A. (2024). Efektivitas komunikasi lintas instansi dalam proses clearance kapal di pelabuhan nasional. *Jurnal Transportasi Laut Indonesia*, 10(2), 61–73.
- Hurriyati, D. (2022). Hubungan antara kepuasan kerja dengan disiplin kerja pada guru SMA “XY”. *Bina Patria*, 12(2), 21–32.
- International Maritime Organization. (2019). *FAL convention guidelines on maritime single window* (MSC.1/Circ.1594/Rev.2). IMO.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Masterplan pengembangan Pelabuhan Makassar 2021–2045*.
- Kuncoro, S., Hindiyani, N., Wijaya, L. A., Cahyati, G. D., & Njoto, H. (2020). Tinjauan peradilan perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Transparansi Hukum*, 3(2).
- M, H., & Ahmad, D. (2017). Developing greeting and self-introducing materials dealing with the 2013 curriculum of the seventh grade in MTsN Balang-Balang. *ETERNAL (English*,

Teaching, Learning and Research Journal), 3(2), 124–135.
<https://doi.org/10.24252/eternal.v32.2017.a2>

Nasar, I., Nurdianingsih, F., Rahmi, E., & Purwanto, M. B. (2024). Values of character education: Study of strengthening the culture of digital literacy for youth in the disruptive 5.0 era. *Gema Wiralodra, 15(1), 596–604.*
<https://doi.org/10.31943/gw.v15i1.688>

Nurhayati, D., & Rachim, F. (2022). Efisiensi pelayanan pelabuhan dalam rantai pasok maritim nasional. *Jurnal Logistik dan Kepelabuhanan, 8(4), 120–131.*

Puspa, N. (2019). Dinamika kesiapan petani kelapa sawit dalam penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) di Provinsi Jambi. *Jurnal Perkebunan Indonesia, 3(2), 1–12.*

Putranto, A. D., Wardiningsih, S. S., & Suprayitno, S. (2018). Pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 18(3).*
<https://doi.org/10.23917/dayasaing.v18i2.4507>

Rosyidi, M., Azlina, N., & Putra, A. A. (2018). Pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau.*
<https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/21747>

Tandung, E., Prasetyo, Y., & Sari, D. P. (2022). Digitalisasi layanan pelabuhan: Studi kasus Inaportnet di Pelabuhan Makassar. *Jurnal Transportasi Maritim, 10(1), 33–47.*

Yuliana, D., & Prakoso, N. (2022). Efektivitas Inaportnet dalam pelayanan kapal dan barang di pelabuhan Indonesia. *Jurnal Ilmu Transportasi Laut, 7(4), 110–124.*